

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Stabilitas Sistem Keuangan memiliki peran krusial dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena dapat membantu proses alokasi dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang membutuhkan dana tambahan (*defisit*) sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan dana dalam perekonomian. Selain itu sistem keuangan dapat meningkatkan kapasitas perekonomian nasional dan membantu aliran dana melalui layanan pembayaran (World Bank, 2020). Sistem keuangan juga sangat erat kaitannya dengan keberlangsungan dan stabilitas perekonomian, karena pelaku sistem keuangan tidak terbatas pada lembaga keuangan seperti bank sentral, bank umum, lembaga sekuritas, dan asuransi. Namun juga melibatkan pihak lain seperti rumah tangga, sektor publik, properti, pasar keuangan, lembaga non keuangan, dan pemerintah (IMF, 2019).

Stabilitas keuangan mengacu pada kondisi dimana mekanisme pasar untuk penetapan harga, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko berjalan cukup baik untuk mendukung kelancaran kinerja perekonomian. Untuk disebut sebagai sistem keuangan yang stabil, sistem tersebut harus mampu menghindari pengaruh risiko sistemik dan volatilitas. Sistem keuangan yang stabil harus mampu mengelola risiko keuangan, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan mengurangi gejolak harga aset riil atau keuangan yang tidak diinginkan. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terhambat ketika proses alokasi dana tidak berlangsung optimal karena sistem keuangan negara tersebut tidak berfungsi secara efisien dan kurang stabil (Ahamed & Mallick, 2019).

Ketidakstabilan sistem keuangan berpotensi menimbulkan beberapa masalah yang dapat mengganggu siklus perekonomian suatu negara dan menimbulkan permasalahan ekonomi yang serius. Kondisi ini sama dengan krisis global tahun 2008 yang berdampak negatif terhadap kinerja perekonomian banyak

negara. krisis global pada tahun 2008 yang diawali dengan resesi ekonomi AS akibat *subprime mortgage* turut berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan laporan Bank Indonesia (2009), pada saat krisis global tahun 2008, terjadi arus keluar modal asing dari pasar keuangan Indonesia senilai US\$ 6,5 miliar. Investor asing menarik dananya dari Indonesia karena ketidakpastian pasar global yang memicu peningkatan risiko investasi dan membuat investor asing lebih memilih untuk menempatkan dananya di negara asal. Contoh lain yang menunjukkan pentingnya stabilitas sistem keuangan bagi keberlangsungan perekonomian negara adalah krisis keuangan di Asia pada tahun 1997 - 1998, termasuk di Indonesia. Saat itu terdapat penurunan yang signifikan dalam nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Dalam beberapa bulan awal tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun drastis dari sekitar Rp. 4.850 per dolar AS hingga hampir menyentuh angka Rp. 17.000 per dolar AS. Pasar uang, pasar valuta asing, dan pasar modal di Indonesia terguncang sehingga menimbulkan risiko besar terjadinya arus keluar modal yang besar. Krisis keuangan menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan mengakibatkan penarikan tabungan yang masif dari bank.

Krisis keuangan pada tahun 1997 dan 2008 menunjukkan bahwa setiap negara perlu mengatur dan mengawasi sistem keuangannya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut Khasanah & Kurniawan (2021) pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya akan lebih mudah terpengaruh oleh krisis keuangan global yang terjadi di negara maju. Hal ini dikarenakan wilayah Asia Tenggara memiliki perekonomian yang bergantung pada ekspor komoditas dan investasi asing, serta pemerintah atau swasta memiliki tingkat utang yang tinggi, kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi global dapat mengancam stabilitas ekonomi domestik (Cook & Pincus, 2014).

Dalam penelitian ini, negara-negara ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand) dipilih sebagai subjek penelitian karena kelima negara tersebut memiliki pasar modal yang relatif besar dan memiliki perkembangan ekonomi yang signifikan di kawasan Asia Tenggara.

Tabel 1. Karakteristik Sistem Keuangan di Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura

Negara	Dominasi Bank	Kondisi Pasar Modal	Tantangan
Indonesia	Bank-bank Negara	Berkembang	Ketertgantungan Pada Dana Asing
Malaysia	Bank Lokal dan Cabang Bank Asing	Aktif dan Maju	Menghadapi Risiko Kredit dan Risiko Pasar
Thailand	Bank-bank Negara	Berkembang	Menghadapi Risiko Kredit dan Risiko Pasar
Filipina	Bank-bank Negara	Berkembang	Ketertgantungan Pada Dana Asing
Singapura	Bank Multinasional	Berkembang dan Inovatif	Rentan terhadap Volatilitas Pasar Global.

Sumber: IMF (2019)

Dari tabel 1 diketahui bahwa Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura memiliki sistem keuangan yang berkembang dengan karakteristik yang berbeda dari kondisi bank yang mendominasi, kondisi pasar modal, dan tantangan yang dihadapi. Keberagaman kondisi sistem keuangan di lima negara tersebut dapat memberikan gambaran yang cukup representatif mengenai stabilitas sistem keuangan di Asia Tenggara dan dapat dijadikan subjek dalam penelitian ini.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan stabilitas sistem keuangan, beberapa negara Asia Tenggara fokus kepada pelaksanaan program inklusi keuangan (Rauf et al., 2021). Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dapat didorong melalui inklusi keuangan dengan menyediakan layanan sistem keuangan yang mudah dijangkau masyarakat. Maka negara-negara di Asia Tenggara sudah mulai memberikan akses layanan keuangan formal kepada masyarakat yang kurang terlayani, terutama masyarakat yang tidak mendapatkan informasi tentang lembaga keuangan dan merasa kesulitan dengan produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan, serta memberikan biaya yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

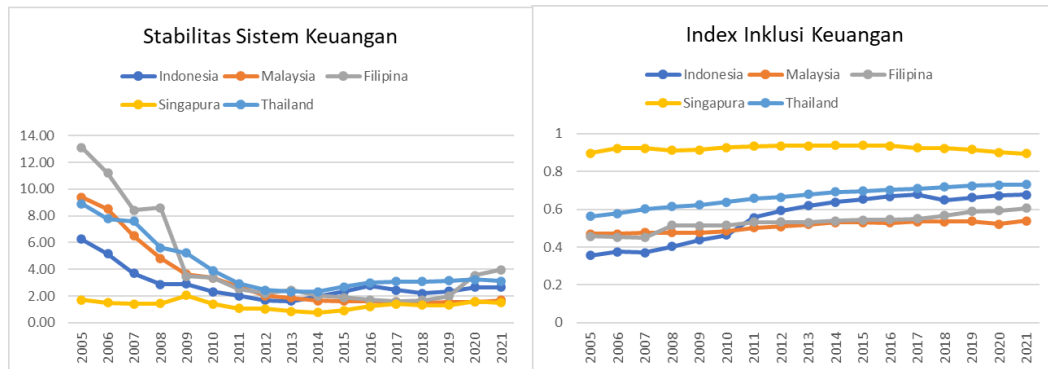
Keterkaitan inklusi keuangan dengan stabilitas sistem keuangan dapat dijelaskan bahwa ketika inklusi keuangan meningkat, maka tingkat risiko dalam sistem keuangan juga meningkat. Pasalnya, risiko krisis likuiditas dan krisis keuangan juga meningkat, karena pertumbuhan inklusi keuangan memungkinkan

Novi Rahmawanti, 2023

ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

munculnya perusahaan kecil dan menengah yang lebih rentan terhadap risiko keuangan (Keen, 1995). Berikut adalah grafik dari index inklusi keuangan negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand Tahun 2005 sampai dengan 2021:



Sumber: World Bank (2023)

Gambar 1. IFI-SSK pada Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand

Selama periode 2009-2019 kelima negara Asia Tenggara mengalami gejala perekonomian yang berlawanan dengan teori yang ada. Dimana nilai index inklusi keuangan yang selalu meningkat setiap tahun diiringi dengan membaiknya kondisi stabilitas sistem keuangan yang ditunjukkan dengan nilai rasio NPL semakin menurun setiap tahun, namun mengalami peningkatan yang cukup konsisten. Kondisi ini selaras dengan penelitian Rauf et al (2021) dan Jima & Makoni (2022) yang menemukan tentang pengaruh positif yang diberikan oleh inklusi keuangan kepada stabilnya sistem keuangan.

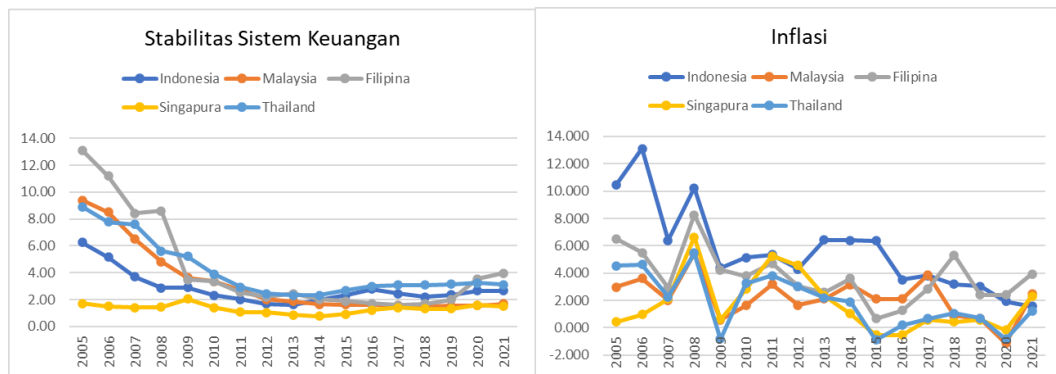
Stabilitas sistem keuangan dapat dicapai tidak hanya melalui inklusi keuangan, tetapi juga dengan menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi, suku bunga, dan peredaran uang di masyarakat. Variabel kebijakan moneter ini saling terkait satu sama lain. Misalnya, saat inflasi meningkat, bank sentral akan meningkatkan suku bunganya guna menurunkan jumlah uang beredar dan mengurangi inflasi. Jika inflasi terus meningkat, ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan sistem keuangan. Di sisi lain, jika inflasi terlalu rendah, hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan mengakibatkan kelebihan uang yang beredar, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan (Tobal & Menna, 2020)

Novi Rahmawanti, 2023

ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Keterkaitan antara inflasi dan stabilitas sistem keuangan dapat dijelaskan melalui hipotesis ketidakstabilan keuangan (FIH), dalam pandangan FIH inflasi yang tinggi dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan. Pasalnya, risiko gagal bayar meningkat akibat kenaikan suku bunga karena inflasi tinggi yang dapat memperburuk kualitas kredit. Kondisi ini akan memicu krisis keuangan yang pada akhirnya bisa berdampak secara keseluruhan pada perekonomian (H. P. Minsky, 1977). Teori FIH sejalan dengan hasil penelitian Elsayed et al (2023) dengan menggunakan *Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model* (NARDL) yang memperoleh hasil bahwa inflasi memberikan pengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan. Berikut adalah grafik dari index inklusi keuangan negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina Tahun 2005 sampai dengan 2021:



Sumber: World Bank (2023)

Gambar 2. Inflasi-SSk pada Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand

Gejala yang tidak sesuai dengan teori juga tampak pada keterkaitan antara inflasi dan stabilitas sistem keuangan. Di Indonesia, pada tahun 2008 ketika inflasi naik hampir 4% menjadi 10.2% dari 6.4%, pada sisi stabilitas sistem keuangan berlandaskan teori harusnya rasio NPL mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun tersebut, rasio NPL menurun dari 3.6% ke 2.8%. Ketidaksesuaian dengan teori juga ditunjukkan pada tahun 2020, ketika inflasi turun sebesar 1.1% dari 3% menjadi 1.9%, stabilitas sistem keuangan justru memburuk dengan nilai rasio yang naik dari 2.3% menjadi 2.6%. Di tahun yang sama pada Negara Malaysia juga terjadi gap teori, ketika inflasi meningkat menjadi 5.4% dari 2% pada periode sebelumnya, namun nilai rasio NPL mengalami penurunan menjadi 4.8% dari 6.5%. Di Filipina pada tahun 2014 inflasi meningkat menjadi 3.59% dari 2.58% pada periode

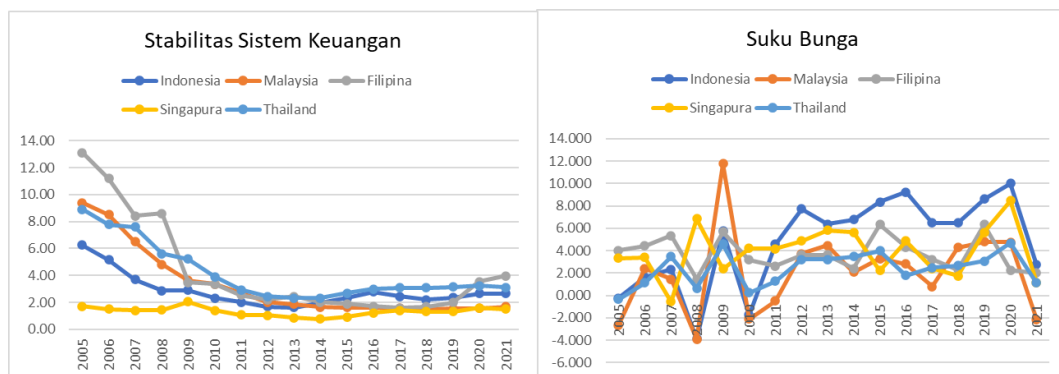
Novi Rahmawanti, 2023

ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sebelumnya, namun rasio NPL mengalami penurunan menjadi 2% dari 2.4% pada periode sebelumnya. Singapura sebagai negara maju di Asia tenggara juga mengalami gejala yang tidak sesuai dengan teori. Pada tahun 2015, inflasi di Singapura mengalami penurunan dari 1% menjadi -0.5% dan dari sisi stabilitas sistem keuangan, nilai rasio NPL tidak mengalami kenaikan sebagaimana dijelaskan dalam teori, nilai rasio NPL justru mengalami kenaikan sebesar 0.2% pada tahun tersebut. Pada tahun 2010 di Thailand nilai inflasi naik lebih dari 3% dari -0.9% menjadi 3.2%, namun dari sisi stabilitas sistem keuangan yang ditunjukkan melalui rasio NPL tidak mengalami kenaikan sebagaimana dijelaskan dalam teori.

Selanjutnya memasuki variabel lainnya yang dapat memberikan pengaruh bagi stabilitas sistem keuangan adalah suku bunga. Keterkaitan suku bunga dengan stabilitas sistem keuangan dijelaskan oleh Minsky (1982) terjadi karena terdapat hubungan yang kompleks antara kenaikan suku bunga, kredit dan risiko di sistem keuangan. Ketika suku bunga naik, permintaan kredit akan menurun, dan investor akan menarik dananya dari pasar keuangan. Hal ini dapat menyebabkan penurunan harga aset dan krisis keuangan. Selain itu, bank sentral memiliki peran penting dalam memantau risiko di sistem keuangan dan mengambil langkah pencegahan sebelum terjadi krisis. Berikut adalah grafik dari suku bunga negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina Tahun 2005 sampai dengan 2021:



Sumber: World Bank (2023)

Gambar 3. Suku Bunga-SSk pada Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand

Berlandaskan teori dimana suku bunga berpengaruh negatif terhadap stabilitas sistem keuangan, maka ketika suku bunga mengalami kenaikan stabilitas

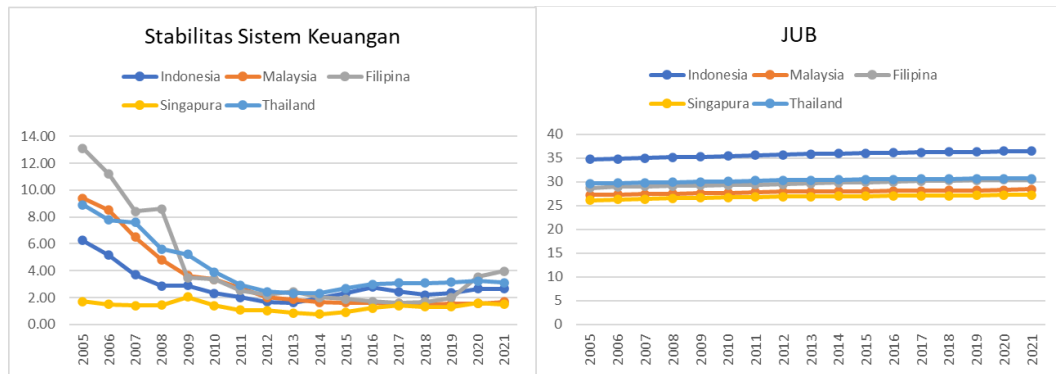
Novi Rahmawanti, 2023

ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

sistem keuangan yang ditunjukkan melalui rasio NPL juga mengalami kenaikan. Kondisi berbeda ditunjukkan oleh Indonesia pada tahun 2013 ketika suku bunga naik hingga 2% dari 4.2% menjadi 6.4%, rasio NPL mengalami penurunan sebesar 0.1% dari 1.7% menjadi 1.6%. Malaysia juga mengalami gap teori yaitu pada tahun 2020 ketika suku bunga turun dari 4.8% menjadi 4.7%, rasio NPL justru meningkat sebesar 0.1% dari 1.5% menjadi 1.6%. Kondisi yang sama dialami oleh Filipina dimana tingkat suku bunga Filipina selalu berfluktuasi, namun nilai rasio NPL cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Misalnya pada tahun 2015, suku bunga Filipina naik sebesar 3.9% tetapi rasio NPL tidak mengalami kenaikan seperti yang dijelaskan dalam teori dan mengalami penurunan sebesar 0.2%. Singapura yang merupakan negara maju di kawasan Asia Tenggara juga tak luput dari gap teori yang terjadi, salah satunya ketika suku bunga turun sebesar 3.4% pada tahun 2015, dari sisi stabilitas sistem keuangan yang ditunjukkan melalui rasio NPL mengalami penurunan sebesar 0.2% yang mana tidak sesuai dengan penjelasan teori. Hal serupa terjadi pada Thailand dimana terjadi beberapa gejala yang tidak sesuai dengan teori. Pada tahun 2009 suku bunga Thailand naik menjadi 4.5% dari 0.6% dari sisi stabilitas sistem keuangan rasio NPL tidak mengalami kenaikan seperti yang dijelaskan teori, namun pada tahun 2016 ketika suku bunga turun mencapai 1.8% dari 3.9% dari sisi stabilitas sistem keuangan rasio NPL mengalami kenaikan sebesar 0.4% menjadi 3% dari 2.6%.

Selanjutnya hubungan jumlah uang beredar dengan stabilitas sistem keuangan dijelaskan sebagai apabila jumlah uang beredar berkurang maka akan terjadi penurunan harga barang. Ketika harga agregat mengalami penurunan terus menerus, maka akan menyebabkan deflasi. Pada saat terjadi deflasi, pendapatan pelaku usaha cenderung menurun karena jumlah uang yang beredar di masyarakat berkurang. Rendahnya jumlah uang yang beredar membuat masyarakat cenderung menahan pengeluarannya sehingga omzet pelaku usaha menurun. Akibatnya, pelaku usaha kesulitan mengembalikan pinjaman ke perbankan (H. P. Minsky, 1982). Berikut adalah grafik dari jumlah uang beredar di negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina Tahun 2005 sampai dengan 2021:



Sumber: World Bank (2023)

Gambar 3. JUB-SSk pada Negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand

Berlandaskan teori ketika JUB mengalami kenaikan, maka stabilitas sistem keuangan yang ditunjukkan melalui rasio NPL akan mengalami penurunan. Namun berdasarkan data tahun 2005 sampai dengan 2021 ditemukan beberapa gejala yang tidak sesuai dengan teori. Di Indonesia pada tahun 2014 ketika M2 meningkat hingga 400 Miliar USD dan pada tahun 2020 meningkat 800 Miliar USD dari sisi stabilitas sistem keuangan tidak menunjukkan nilai rasio NPL yang menurun tapi justru sebaliknya. Tak hanya Indonesia, pada tahun 2019 Malaysia mengalami peningkatan M2 sebesar 40 Miliar USD hingga 100 Miliar USD pada tahun 2020, namun rasio NPL tidak menunjukkan penurunan sebagaimana dijelaskan dalam teori. Kondisi serupa terjadi di Filipina pada tahun 2013 M2 naik hingga 200 Miliar USD, namun rasio NPL turut terjadi peningkatan menjadi 2.4% dari yang semula hanya 2,2%. Fenomena ini terjadi kembali pada tahun 2019, ketika M2 Filipina naik sebesar 100 Miliar USD dari sisi stabilitas sistem keuangan rasio NPL mengalami kenaikan sebesar 0.3%. Singapura sebagai negara maju juga tak luput dari gap teori. Pada tahun 2009 JUB Singapura meningkat hingga 100 Miliar USD dari sisi stabilitas sistem keuangan rasio NPL mengalami kenaikan hingga 2.3% dari 1.4% dan menjadi yang tertinggi sepanjang 1 dekade terakhir. Kondisi serupa terjadi kembali pada tahun 2020 ketika JUB Singapura naik hingga 1 Triliun USD rasio NPL mengalami kenaikan sebesar 0.3%. Selanjutnya Thailand juga turut mengalami gap teori hubungan antara JUB dan stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 2015 JUB Thailand naik hingga 100 Miliar USD dan dilanjutkan dengan kenaikan hingga 200 Miliar USD pada tahun 2016 dari sisi stabilitas sistem

Novi Rahmawanti, 2023

ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan
www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id

keuangan rasio NPL tidak menunjukkan penurunan dan sebaliknya menunjukkan kenaikan rasio NPL hingga 0.7%.

Karena adanya beberapa keadaan saat adanya krisis global yang mengganggu stabilitas sistem keuangan di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, dan juga terdapat beberapa fenomena seperti ketidaksamaan dalam teori, hasil, kesimpulan, dan penggunaan variabel proksi pada penelitian terdahulu mengenai stabilitas sistem keuangan, maka perlu dilakukan penelitian yang membahas pengaruh inklusi keuangan dan kebijakan moneter terhadap stabilitas sistem keuangan di negara kawasan Asia Tenggara. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul "**Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan dan Kebijakan Moneter terhadap Stabilitas Sistem Keuangan di Asia Tenggara**"

I.2 Perumusan masalah

Sistem keuangan berperan secara krusial pada ekonomi kenegaraan karena dapat membantu dalam pengalokasian sumber daya, terutama dana, dari pihak dengan nada lebih kepada pihak dengan kebutuhan terhadap dana. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara unit *surplus* dan *defisit* dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka. Selain itu, melalui sistem pembayaran sistem keuangan dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dalam perekonomian dan memfasilitasi aliran dana. Stabilitas sistem keuangan penting untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas perekonomian. Kondisi makroekonomi suatu negara dapat mempengaruhi kelancaran stabilitas sistem keuangan. Terdapat beberapa indikator ekonomi makro yang biasa dipakai untuk mengukur stabilitas sistem keuangan yaitu pertumbuhan ekonomi, JUB, inflasi, IHSG, nilai tukar dan suku bunga dan nilai tukar.

Salah satu prinsip stabilitas ekonomi adalah investasi, yang bertujuan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dengan mengurangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan di antara warga negara. Inklusi keuangan sebagai kebijakan yang tujuannya adalah memudahkan akses masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan, menjadi salah satu kebijakan yang digunakan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil. Kebaruan dari penelitian ini adalah pemilihan variabel kebijakan moneter yang digunakan, pemilihan kelima negara Asia Tenggara

dengan latar belakang perekonomian yang berbeda sehingga dapat merepresentasikan kondisi perekonomian di kawasan Asia Tenggara, selain itu tahun penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya dimana penelitian ini dimulai dari tahun 2005 ketika berlakunya 3 perjanjian perdagangan ASEAN yaitu ACFTA, AANZFTA, dan AIFTA yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi antara negara kawasan Asia Tenggara dengan negara di luar kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan informasi latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana inklusi keuangan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan?
2. Bagaimana inflasi mempengaruhi stabilitas sistem keuangan?
3. Bagaimana suku bunga mempengaruhi stabilitas sistem keuangan?
4. Bagaimana jumlah uang beredar mempengaruhi stabilitas sistem keuangan?

I.3 Tujuan penelitian

Beberapa tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap stabilitas sistem keuangan.
3. Mengetahui dan menganalisis suku bunga terhadap stabilitas sistem keuangan.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap stabilitas sistem keuangan.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak antara lain :

1.1.1 Manfaat Teoritis

Meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara inklusi keuangan, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Studi ini dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara inklusi

keuangan, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan serta sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.1.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah

Dapat memberikan bukti empiris yang diperlukan untuk menjustifikasi kebijakan tertentu yang ditujukan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan stabilitas sistem keuangan. Serta dapat membantu mendorong kebijakan moneter yang lebih efektif dan tepat sasaran dalam mengatasi permasalahan stabilitas sistem keuangan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah literatur penelitian mengenai hubungan antara inklusi keuangan, kebijakan moneter, dan stabilitas sistem keuangan. Ini dapat membantu peneliti dan akademisi dalam memperkaya pemahaman mereka tentang topik dan membantu menyempurnakan teori dan metodologi yang ada.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian kali ini diharapkan dapat menjadi landasan teori, inspirasi dan motivasi bagi para peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan penelitian ini secara lebih baik lagi.